PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) DI KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO

Yusuf Kalaha[1], Widya Kurniati Mohi[2], Sakbir[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
yusufkalaha@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Poor Poor Joint Business Group program in Duhiadaa District, Pohuwato Regency. The results showed that; socialization has not been maximized because it is only done on limited forums. The target group of this program is right on target, this can be seen from the rigorous selection process in determining the distribution of aid. Stimulant assistance is considered inadequate. The suitability of the type of business and assistance is not appropriate, this is because to make a different business certainly requires a different amount of capital. Distribution of venture capital assistance is very good, namely by providing assistance in the form of goods in accordance with the type of business. Counseling business skills are minimal. Limited funds are the main factor in this problem. The assistance process did not run optimally due to lack of assistance and lack of budget to form more assistance teams.

Kata Kunci: Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; sosialisasi belum maksimal karena hanya di lakukan pada forum-forum terbatas saja. Kelompok sasaran dari program ini sudah tepat sasaran, hal ini terlihat dari proses seleksi yang ketat dalam penentuan penyaluran bantuan. Bantuan stimulan dianggap belum memadai. Kesesuaian jenis usaha dan bantuan belum sesuai, hal ini dikarenakan untuk membuat sebuah usaha yang berbeda pasti membutuhkan besaran modal yang berbeda pula. Penyaluran bantuan modal usaha sudah sangat baik, yakni dengan memberikan bantuan berupa barang sesuai dengan jenis usaha. Penyuluhan keterampilan berusaha tergolong minim. Keterbatasan dana menjadi faktor utama permasalahan tersebut. Proses pendampingan tidak berjalan maksimal dikarenakan kurangnya pendampingan serta kurangnya anggaran untuk membentuk tim pendamping yang lebih banyak.

Kata Kunci: Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin

PENDAHULUAN.

Beberapa program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah. Namun adopsi sistem penanggulangan kemiskinan secara statis, melalui program kompensasi, bantuan langsung pangan, voucher pelayanan minimum kesehatan dan pendidikan, hanya dapat memecahkan persoalan kemiskinan jangka pendek (World Development Report, 2004). Mengingat ketika program telah berakhir, masyarakat miskin masih tetap memerlukannya. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari program kompensasi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin dan bantuan-bantuan non-tunai lainnya, seperti beras untuk orang miskin (Raskin), bantuan kesehatan (Askeskin) serta di bidang pendidikan (BOS), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Inseminasi Buatan, PPK, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan lainnya, namun pada kenyataannya penduduk miskin tidak berkurang dengan jumlah yang cukup besar.

Untuk itu penajaman program-program pengentasan kemiskinan ke depan perlu diperhatikan lebih serius, khususnya upaya peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi yang mengarah pada kelompok usaha bersama, yang mampu mengantarkan masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinannya. Hambatan dan kelemahan berbagai program penanggulangan kemiskinan memang banyak ditemukan di lapangan terutama disebabkan oleh sosialisasi yang kurang efektif, baik kepada anggota masyarakat yang menjadi subyek program maupun kepada pelaksana program itu sendiri. Ada beberapa program yang tidak mengikutsertakan secara aktif masyarakat, sehingga banyak dijumpai kasus bahwa program dilaksanakan tidak tepat sasaran, baik dari jenis kegiatan ataupun kelompok sasarannya.

Kartasasmita (1996) menyatakan salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Hal ini didukung oleh Sajogyo (1997) bahwa pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama yang dilakukan secara bertahap, terus-menerus, dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri.

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang menggunakan kelompok usaha bersama sebagai sasaran dan alat

pencapaian tujuan pada pertengahan tahun 2007 adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Program ini dilakukan oleh Kementrian Sosial RI untuk mendukung suksesnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan memberikan jaminan permodalan usaha yang mampu memfasilitasi kelompok fakir miskin yang telah diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif.

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) ini mempunyai fungsi untuk peningkatan modal usaha jadi diharapkan dengan berusaha dalam bentuk kelompok akan lebih bisa meningkatkan jumlah modal capital, meningkatkan daya saing dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan sumber daya manusia yaitu berupa keterampilan sampai dengan penguasaan teknologi, dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengentasan kemiskinan itu sendiri. Sedangkan tujuan dari dibentuknya Kelompok Usaha Bersama-FM ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat anggota KUBE di dalam pemenuhan kebutuhan pokok baik berupa papan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya.

Pembentukan kelompok ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dalam interaksinya dalam keluarga ataupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas dan yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan kesadaran partisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial di lingkungannya baik dalam kepedulian, rasa tanggung jawab, dan keikutsertaan dalam usaha-usaha peningkatan kesejahteraan sosial.

Melalui KUBE-FM, masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis, dengan kata lain KUBE-FM merupakan program investasi jangka panjang. Melalui KUBE masyarakat miskin yang sangat lemah dan rentan dapat saling bahu membahu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Sesuai dengan ketentuannya KUBE-FM merupakan kumpulan orang-orang fakir miskin yang bersepakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan pembiayaan modal agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan.

Landasan hukum pelaksanaan program bantuan sosial fakir miskin melalui program KUBE-FM yang dijelaskan oleh Kementerian Sosial melalui buku Pedoman KUBE (2011) meliputi; (1) Sosialisasi program kepada masyarakat, (2) Seleksi dan pembentukan kelompok (Kelompok sasaran), (3) Bantuan Stimulan/bantuan anggaran, (4)

Pemilihan/ kesesuaianjenis usaha dan bantuan , (5) Penyaluran bantuan modal usaha, (6) Pelatihan keterampilan usaha/ kerja bagi anggota KUBE, dan (7) Pendampingan dan monitoring.

Program KUBE-FM ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduknya berada pada garis kemiskinan seperti Kabupaten Pohuwato yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Gorontalo. Salah satu wilayah di Kabupaten Pohuwato yang menjadi lokasi sasaran dari program KUBE-FM adalah wilayah dengan potensi yang besar yakni di wilayah pesisir, dimana Kabupaten Pohuwato secara geografis didominasi oleh wilayah pesisir dengan potensi laut yang sangat besar sehingga di harapkan dengan adanya porgam KUBE-FM ini akan mampu memaksimalkan potensi yang ada.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) khususnya di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato selaku pelaksana dan penanggung jawab program KUBE-FM dalam mengawal pelaksanaan program ini. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya jumlah bantuan dana yang diperuntukkan untuk penerima bantuan program KUBE-FM. Jika dibandingkan dengan jumlah dana pada jenis bantuan lain seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas yang Rp. 3.500.00 per individu atau perorang dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Warga Binaan yang mendapatkan Rp. 5.000.00 per individu atau perorang, sedangkan KUBE-FM mendapatkan Rp. 20.000.000 untuk 1 kelompok, dimana dalam setiap kelompok terdapat 10 orang anggota, maka setiap individu atau orang hanya mendapatkan Rp. 2.000.000 saja. Jumlah bantuan dana KUBE-FM selama ini dianggap terlalu kecil dan hanya dihabiskan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari anggota.

Proses penyuluhan keterampilan berusaha kepada masyarakat penerima bantuan KUBE-FM yang dilakukan oleh pihak Pemerintah tidak berkesinambungan. Selama ini proses penyuluhan cenderung bersifat umum dan tidak spesifik sesuai dengan potensi masyarakat pesisir, sedangkan KUBE-FM yang ada di Kecamatan Duhiadaa bergerak pada beberapa usaha seperti pembuatan kue, nelayan tangkap, dan pertanian.

Proses pendampingan sebagai salah satu instrument penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dari setiap kelompok penerima bantuan dinilai jauh dari kata maksimal, hal ini disebabkan tidak adanya pendamping khusus dari setiap kecamatan untuk program KUBE ataupun pendamping

untuk setiap KUBE-FM padahal penerima anggota adalah tergolong keluarga fakir miskin yang butuh banyak bimbingan dalam menjalankan usahanya. Kendala tersebut karena adanya keterbatasan dana/anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam membiayai seluruh proses internal organisasi atau operasional organisasi dalam rangkai pencapaian efektifitas ketercapaian tujuan program.

Beberapa penelitian tentang Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miksin (KUBE-FM) sudah dilakukan, namun artikel ini memiliki pembeda dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini penulis berfokus pada pelaksanaannya dengan menggunakan 7 indikator yang mengacu pada pedoman KUBE dari kementerian sosial (2011:31) yang menjelaskan tentang Pelaksanaan KUBE dengan indikator; Sosialisasi, Seleksi dan pembentukan kelompok (Kelompok sasaran), Bantuan Stimulan/bantuan anggaran, Pemilihan/kesesuaian jenis usaha dan bantuan, Penyaluran bantuan modal usaha, Pelatihan keterampilan usaha/ kerja bagi anggota KUBE dan Pendampingan dan monitoring.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji secara mendalam tentang sejauh mana Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miksin (KUBE-FM) di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci,seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2013:9). Oleh karena itu peneliti lebih menekankan pada metode penelitian deskritif kualitatif. Penelitian berupa studi kasus, yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-masing elemen tersebut diteliti, kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk data-data yang diteliti saja. Jenis data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, nilai nominal, atau bilangan tetapi berupa struktur organisasi, sejarah, visi dan misi serta job diskripsi instansi.

Dengan melihat penggunaan pendekatan dan jenis penelitian dalam penelitian ini, maka adapun kehadiran peneliti yaitu sebagai instrumen utama yang harus berbaur dengan lingkungan penelitian. Dalam hal ini, peneliti langsung menelaah dan menganalisa sumber data terkait dengan permasalahan penelitian sehingga hasil penyusunan penelitian nantinya akan menjadi akurat. Kehadiran peneliti sendiri dilokasi penelitian diawali dengan melakukan rancangan penelitian dan melakukan pemilihan lokasi sebagai objek sebagai lokus yang memiliki permasalahan.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu primer dan

sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; observasi, wawancara, dan dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan program secara umum adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan potensi serta sumber kesejahteraan sosial bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Adapun sasaran program ini adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, kesehatan dan pendidikan).

Kriteria yang menjadi kelompok sasaran program adalah kepala keluarga atau anggota keluarga yang mewakili keluarga fakir miskin, memiliki identitas kependudukan, berniat usaha, usia produktif dan memiliki keterampilan, mampu bertanggung jawab sendiri, serta bersedia mematuhi aturan KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

Berikut uraian pembahasan terkait dengan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miksin (KUBE-FM) di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dengan mengacu pada pedoman KUBE dari kementerian sosial (2011:31) yang menjelaskan tentang Pelaksanaan KUBE dengan indikator; Sosialisasi, Seleksi dan pembentukan kelompok (Kelompok sasaran), Bantuan Stimulan/bantuan anggaran, Pemilihan/kesesuaian jenis usaha dan bantuan, Penyaluran bantuan modal usaha, Pelatihan keterampilan usaha/ kerja bagi anggota KUBE dan Pendampingan dan monitoring.

Sosialisasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program. Demikian halnya dengan program KUBE pada Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato yang tentunya akan terlaksana secara efektif apabila komunikasi antara pihak-pihak yang terkait berjalan dengan baik.

Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak Dinas Sosial selaku pelaksana program dengan masyarakat selaku sasaran utama dari program KUBE menjadi hal yang mutlak diperlukan demi tercapainya keefektifan pelaksanaan program KUBE ini. Bentuk komunikasi disini tentunya dapat diinterpretasikan melalui proses sosialisasi program kepada masyarakat yang merupakan sasaran dari program yang bersangkutan. Sosialisasi menjadi kunci utama keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena semakin baik proses

sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari program tersebut.

Dengan begitu masyarakat akan semakin terdorong untuk mengakses informasi lebih jauh mengenai program ini serta ambil bagian dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut.

Terkait proses sosialisasi program KUBE yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, setelah penulis melakukan penulusuran lewat hasil wawancara ditemukan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri kurang maksimal.

Dengan melihat kondisi di lapangan terkait cara yang digunakan oleh pihak pelaksana program dalam mensosialisasikan program KUBE, penulis merasa masih minim, karena hanya disampaikan melalui forum-forum pertemuan pihak-pihak tertentu saja, itupun informasi akan bantuan ini lebih banyak tersebar dari mulut ke mulut. Pihak dinas sosial masih tergolong jarang melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, ataupun memasang spanduk-spanduk terkait program KUBE. Hal ini diakui oleh pihak Dinas Sosial disebabkan oleh adanya keterbatasan dana untuk membiayai proses sosialisasi tersebut.

Media komunikasi yang cukup sederhana ini menghambat kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mengakses program ini. Selain itu, masih kurangnya respon masyarakat terhadap program ini lebih dikarenakan belum adanya pemahaman yang memadai tentang konsep program KUBE yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena proses sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih tergolong sangat minim. Sebelum program ini terlaksana, pihak Dinas Sosial memang sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini namun tidak cukup sering sehingga masih banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan program ini, menjadi tidak mendapatkan informasi dan akses yang baik untuk ambil bagian dalam program ini. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini dinas sosial agar lebih bisa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat miskin selaku sasaran dari program KUBE.

Kelompok Sasaran

Sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat. Demikian juga halnya dengan program-program yang

khusus dibuat oleh pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Program pemberdayaan seperti program KUBE seharusnya diberikan hanya kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini. Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah yang bisa mendapatkan bantuan dana untuk usaha ini hanya yang memenuhi persyaratan. Setelah adanya kriteria yang harus dipenuhi dalam permohonan bantuan KUBE, yang selanjutnya menjadi perhatian penulis yaitu ketapatan sasaran dari program ini, dalam artian masyarakat yang diberikan bantuan benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, penulis bisa mengatakan bahwa program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato ini sudah tepat sasaran. Hal ini terlihat ketika penulis menulusuri proses pelaksanaan program ini sampai mengunjungi beberapa penerima bantuan KUBE-FM di lapangan. Melalui proses seleksi yang begitu ketat oleh tim yang ditunjuk oleh pihak Dinas Sosial sehingga akhirnya dapat menentukan penerima bantuan adalah yang berasal dari kategori keluarga miskin yang memiliki kesamaan tujuan atau keterampilan untuk bersama-sama membentuk sebuah kelompok usaha yang akan diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah. Hal ini juga tidak terlepas dari kerjasama pemerintah di tingkat kelurahan yang kemudian memperhatikan warganya yang termasuk kategori miskin sekaligus memberikan arahan atau bantuan untuk pengajuan proposal bantuan KUBE bagi warganya yang memenuhi kriteria sampai mendapatkan bantuan tersebut.

Bantuan Stimulan/Bantuan anggaran

Dalam pelaksanaan suatu program, masalah anggaran tentu merupakan salah satu hal mendasar yang menentukan keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tanpa adanya sumber pendanaan dan penganggaran yang baik, pelaksanaan suatu program akan mengalami hambatan serta tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, salah satu aspek pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah yang dijalankan selama ini adalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program-program yang bersangkutan.

Demikian halnya dengan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) yang faktor keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh beberapa aspek, salah satunya adalah masalah pendanaan/anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program ini. Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan

oleh pemerintah pada tahun 2017 hingga 2019 dalam hal pendanaan program KUBE berkisar antara 20 juta / kelompok, dimana dalam setiap kelompok terdapat 10 orang anggota, maka setiap individu atau orang hanya mendapatkan Rp. 2.000.000 saja. Jumlah bantuan dana KUBE-FM selama ini dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah dana pada jenis bantuan lain seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas yang Rp. 3.500.00 per individu atau perorang dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Warga Binaan yang mendapatkan Rp. 5.000.00 per individu atau perorang, sedangkan KUBE-FM mendapatkan Rp. 20.000.000 untuk 1 kelompok.

Untuk mekanisme pencairan dana yang digunakan oleh pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah mentransferkan bantuan tersebut kerekening KUBE. Setelah itu ketika ingin mengambil bantuan tersebut, ketua maupun sekretaris KUBE harus didampingi oleh pendamping yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato. Setelah itu, pendamping bersama anggota KUBE mengadakan barang maupun inventaris usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang telah diajukan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya. Ketika proses pengadaan barang usaha telah selesai anggota KUBE harus membuat laporan pertanggung jawaban mengenai pembelian barang tersebut yang kemudian bersama pendamping diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten pohuwato untuk ditindak lanjuti. Adapun besaran bantuan dana yang diberikan ke tiap kelompok masing-masing itu sebesar 20 juta. Dan dalam proses pencairannya tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato maupun oknum yang terkait pada program KUBE ini.

Pemilihan/Kesesuaian Jenis Usaha Dan Bantuan

Kesesuaian jenis usaha dengan bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan menjadi salah satu aspek yang cukup penting untuk diperhatikan oleh pemerintah agar proses penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar kelompok-kelompok KUBE yang dinyatakan layak untuk diberikan bantuan dapat menjalankan usaha mereka secara optimal.

Dari hasil pengamatan dan analisis, dapat diperoleh informasi bahwa besaran bantuan yang diberikan pada program KUBE ini sama jumlahnya yaitu sebesar 20 juta. Akan tetapi pada perihal kesesuaian modal dengan usaha yang dilakukan oleh KUBE terjadi perbedaan pemahaman. Dari Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato menyatakan bahwa modal dan usaha yang dilakukan itu sudah sesuai, akan tetapi tanggapan dari salah satu anggota KUBE justru agak berbeda dalam hal besaran bantuan yang diberikan, hal

ini dikarenakan untuk membuat sebuah usaha yang berbeda pasti membutuhkan besaran modal yang berbeda pula. Jadi menurut informan tersebut ketika ada proposal bantuan usaha yang disetujui dan di anggap membutuhkan bantuan yang lebih besar, seharusnya diberikan modal yang sebanding pula.

Penyaluran Bantuan Modal Usaha

Salah satu aspek yang juga cukup berpengaruh dalam keefektifan pelaksanaan program KUBE pada Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato adalah mengenai penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat yang mengikuti program KUBE. Penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat penerima bantuan program seyogyanya harus dillakukan secara jelas, transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bila penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pencapaian tujuan yang diharapkan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini akan dengan mudah dicapai. Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan dari program KUBE adalah membantu masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan berusaha sehingga dengan begitu, mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya serta memperbaiki kondisi ekonomi mereka ke arah yang lebih baik.

Adapun mengenai bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan oleh pihak pemerintah kepada kelompok-kelompok KUBE berdasarkan penelusuran penulis di lapangan dari hasil wawancara, diketahui bahwa bentuk bantuan modal usaha yang diberikan oleh dinas sosial Kabupaten Pohuwato berbeda dari bantuan modal yang diberikan oleh dinas-dinas sosial di daerah lain. Jika daerah lain diberikan bantuan modal berupa sejumlah uang tunai yang langsung diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat anggota KUBE, maka di Kabupaten Pohuwato sendiri, pemerintah menyalurkan bantuan modal usaha berupa penyediaan barang/peralatan yang disesuaikan dengan jenis usaha dan keahlian dari kelompok-kelompok KUBE yang terbentuk serta disesuaikan dengan jumlah bantuan yang akan diberikan. Dari informasi yang didapatkan oleh penulis, penyaluran bantuan dalam bentuk penyediaan barang/peralatan usaha yang nantinya diserahkan kepada tiap-tiap KUBE untuk dimanfaatkan sesuai keterampilan yang dimiliki, cukup beralasan karena adanya kekhawatiran tersendiri dari pihak Dinas Sosial selaku pelaksana bahwa jika bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai, ada kemungkinan masyarakat penerima bantuan tidak mengelola dana tersebut sebagaimana mestinya tetapi malah disalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Sesuai dari hasil pengamatan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan usaha yang

dilakukan oleh KUBE sebenarnya tetap di awasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, baik dari Pejabat Dinas Sosial maupun melalui perpanjangan tangannya yaitu TKSK akan tetapi ini dianggap kurang efektif karena pengawasan itu tidak dilakukan secara berkala yang dikarenakan jumlah pendamping yang dianggap kurang apalagi pendamping itu bukan hanya bertugas menjadi program KUBE tapi semua program dari Dinas Sosial yang ada di Kecamatan masing-masing pendamping khususnya di Kecamatan Duhiadaa.

Pelatihan Keterampilan Usaha/Kerja bagi Anggota KUBE

Dalam pelaksanaan program Kelompok usaha Bersama (KUBE), disamping proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana program, proses penyuluhan keterampilan berusaha bagi masyarakat yang menjadi anggota kelompok juga turut berperan dalam pencapaian efektivitas dari pelaksanaan program KUBE. Dimana dalam penyuluhan keterampilan berusaha ini, masyarakat dilatih untuk lebih mengembangkan keterampilan berusaha yang mereka miliki. Hal ini penting agar masyarakat lebih matang dan siap untuk mengelola usaha yang akan mereka jalankan nantinya.

Penulis menemukan bahwa terkait penyuluhan keterampilan berusaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan mendatangkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan biasanya didapatkan dari internal Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Pihak Dinas Sosial biasanya terjun langsung ke lokasi KUBE-FM untuk memberikan penyuluhan kewirausahaan kepada anggota KUBE-FM, bahkan terkadang pihak Dinas Sosial mendatangkan pihak berkompeten dan mengumpulkan kelompok KUBE-FM untuk diberikan penyuluhan secara keseluruhan. Akan tetapi penyuluhan ini masih dianggap belum optimal karena pelaksanaannya yang tidak berkelanjutan karena minimnya dana yang disiapkan untuk program ini penyuluhan ini.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, penulis menyimpulkan bahwa penyuluhan keterampilan berusaha bagi penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Duhiadaa yang dilakukan oleh Dinas Sosial selama ini memang masih tergolong minim. Keterbatasan anggaran/dana menjadi faktor utama permasalahan tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya pihak dinas sosial selaku pelaksana harus diberi apresiasi atas segala yang telah dilakukan dan penulis anggap telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan penyuluhan mengenai keterampilan berusaha. Hal ini ditandai dengan dilakukannya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang merupakan orang-orang berkompeten atau ahli dibidangnya bagi masyarakat penerima bantuan KUBE-FM walaupun kerjasama yang

dilakukan tidak berkelanjutan karena permasalahan anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain mendatangkan orang dari luar Dinas sosial atau Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Pihak Dinas Sosial juga terkadang menggunakan tenaga dari internal Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dianggap memiliki kemampuan khusus terkait pengembangan KUBE-FM.

Pendampingan dan Monitoring

Pendampingan dipahami sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan para anggota KUBE dalam rangka memperkuat dukungan, memecahkan masalah, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan anggota KUBE dalam menjalankan usahanya. Proses pendampingan bagi KUBE menjadi salah satu aspek yang berpengaruh besar dalam menentukan keberhasilan program ini untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaanya. Pendampingan dari pihak-pihak yang berkompeten merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari kelompok-kelompok KUBE yang terbentuk.

Dengan adanya pendampingan, anggota-anggota kelompok dapat terbantu dalam mendapatkan akses informasi tentang program KUBE, prosedur pendaftaran, penjalanan usaha hingga membantu kelompok dalam hal memecahkan masalah dan kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha.

Dari hasil pengamatan dan analisis mengenai pendampingan KUBE yang ada di Kecamatan Duhiadaa dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan untuk KUBE itu tidak berjalan maksimal sesuai yang diharapkan atau boleh dikata pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya sumber daya manusia (pendamping) untuk mendampingi pelaksanaan program KUBE serta kurangnya anggaran untuk membentuk tim pendamping yang lebih banyak. Oleh karena itu dampak yang dirasakan tentu sangat berdampak terhadap perkembangan KUBE yang terbentuk, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa keanggotaan KUBE ini adalah mereka yang tergolong fakir miskin dalam artian untuk makan saja masih sangat susah apalagi ketia diberikan bantuan modal sebesar 20 juta rupiah setiap kelompok yang bernaggotakan 10 orang fakir miskin untuk membuat usaha tanpa adanya pendampingan yang berkelanjutan maka perkembangan usaha KUBE sangat jauh dari kata memungkinkan. Apalagi dalam hal ini, Dinas sosial Kabupaten Pohuwato tidak menyediakan pendamping untuk setiap KUBE akan tetapi pendamping yang disediakan adalah pendamping disetiap Kecamatan, itupun bukan hanya mendampingi program KUBE tapi semua program Dinas Sosial yang ada di setiap Kecamatan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab iv, maka dapat disimpulkan tentang sosialisasi belum maksimal karena hanya di lakukan pada forum-forum terbatas saja. Kelompok sasaran dari program ini sudah tepat sasaran, hal ini terlihat dari proses seleksi yang ketat dalam penentuan penyaluran bantuan. Bantuan stimulan dianggap belum memadai. Kesesuaian jenis usaha dan bantuan belum sesuai, hal ini dikarenakan untuk membuat sebuah usaha yang berbeda pasti membutuhkan besaran modal yang berbeda pula. Penyaluran bantuan modal usaha sudah sangat baik, yakni dengan memberikan bantuan berupa barang sesuai dengan jenis usaha. Penyuluhan keterampilan berusaha tergolong minim. Keterbatasan dana menjadi faktor utama permasalahan tersebut. Proses pendampingan tidak berjalan maksimal dikarenakan kurangnya pendampingan serta kurangnya anggaran untuk membentuk tim pendamping yang lebih banyak.

Saran;

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang peneliti tawarkan sebagai bahan pertimbangan;

1. Sebaiknya pemerintah menyediakan anggaran yang lebih dari yang telah diperuntukkan bagi penerima bantuan KUBE-FM di Kabupaten Pohuwato, karena bantuan yang diberikan merupakan modal awal dari setiap KUBE-FM untuk memulai usaha dan merintis usahanya hingga tumbuh, berkembang, dan maju.
2. Sebaiknya proses penyuluhan keterampilan tidak sekedar formalitas untuk pelaksanaan program setiap tahunnya karena jelas bahwa penerima bantuan KUBE-FM membutuhkan penyuluhan keterampilan berusaha sebagai salah satu bekal bagi upaya mereka membangun usahanya
3. Penting rasanya agar dibuat tim pendamping khusus untuk setiap KUBE-FM yang terbentuk di tingkat Kecamatan hingga Desa, karena proses pendampingan harus dilakukan secara intens sebelum KUBE-FM tersebut dapat dikategorikan dalam tahap berkembang.
4. Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato jika ingin melanjutkan pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya perlu serius dalam pengawalannya dalam artian segala hal yang dinilai kurang optimal perlu ditindaklanjuti seperti proses pendampingan, penyuluhan keterampilan berusaha, serta jumlah bantuan dana yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur penelitian suatu usaha pendekatan praktik.* Jakarta : Rineka Cipta.

Bintoro Tjokroamidjojo, (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Effendy, Onong Uchjana. (2008). *Komunikasi teori dan praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Hanifah Harsono, (2012). *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta, Rineka Cipta.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera*. Jakarta: Kemensos.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Kemensos

Kurniawan, (2009). *Transformasi Pelayanan Public*. Balai Pustaka. Jakarta

Mahmudi, (2009). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Marzuki. (2012). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Muasaroh, (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Kencana Pernada Media Group.

Othenk, (2008). Pengertian tentang efektivitas, (online). Tersedia :http://othenk.blogspot/2008_2008_11_01_achive.html.

Siagian, S. P. (2007). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka cipta

Susanto, (2010). *Produktivitas; Apa dan Bagaimana*. Bumi Aksara. Jakarta

Zahnd, (2008). *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Universitas Tanjung Pura. Mandar Maju. Bandung